

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PPh FINAL  
(Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Jawa Tengah II)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:  
ANNISA FITRIANA KUSUMAWATI  
B200150157**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah  
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan**

**PPh Final**

**(Studi Empiris pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)**

## **PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ANNISA FITRIANA KUSUMAWATI**

**B 200 150 157**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**Drs. M. Abdul Aris., M.Si**

**NIDN: 565/0601016401**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah  
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan  
PPh Final  
(Studi Empiris pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)**

Yang ditulis oleh:



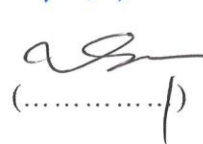
**ANNISA FITRIANA KUSUMAWATI**

**B 200 150 157**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 09 Mei 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat

Dewan penguji:

1. Drs. M. Abdul Aris., M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Fatchan Achyani., S.E., M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Eny Kusumawati., S.E., M.M., Ak., CA  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
**Dr. H. Shamsudin, MM.**  
NIK. 19570217

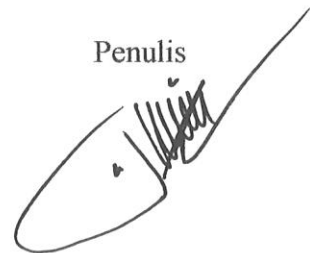
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Mei 2019

Penulis



Annisa Fitriana Kusumawati

B200 150 157

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PPh FINAL  
(Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)**

**Abstrak**

Sumber penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak. Untuk itu, pemerintah mengupayakan agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat, salah satunya dengan perubahan tarif pajak UMKM yang semula 1% dari peredaran bruto menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam rangka peningkatan penerimaan PPh final pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Jumlah populasi adalah 132.999 Wajib Pajak UMKM dan sampel yang memenuhi syarat adalah 105 Wajib Pajak UMKM. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan *willcoxon signed rank test*. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta implementasi PP No. 23 Tahun 2018 ini cukup baik dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang sangat baik dari fiskus, serta adanya perbedaan dalam jumlah Wajib Pajak UMKM serta jumlah penerimaan PPh final sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 ini.

**Kata Kunci:** PP No. 23 Tahun 2018, perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, sosialisasi PP No. 23 tahun 2018, perbedaan, wajib pajak UMKM, penerimaan PPh final, kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Abstract**

The biggest source of state revenue is from the tax sector. To that end, the government seeks to increase taxpayer compliance so that tax revenues will increase, one of which is by changing the MSME tax rate which was originally 1% of gross circulation to 0.5% of gross circulation. The purpose of this study is to analyze the level of taxpayer compliance before and after the application of PP No. 23 of 2018 in order to increase receipt of final PPh at the Central Java Regional Office of the Directorate General of Taxes II. The total population is 791.454 MSME Taxpayers and samples that meet the requirements are 105 MSME Taxpayers. The analysis technique used to analyze the data is descriptive statistics, multiple linear regression analysis, and willcoxon signed rank test. The results show that changes in tax rates and socialization of PP No. 23 of 2018 affects the compliance of MSME Taxpayers. Whereas the ease of paying taxes does not affect the compliance of MSME Taxpayers, and the implementation of PP No. 23 of 2018 is quite good as evidenced by the excellent socialization of the tax authorities, as well as the difference in the number of MSME Taxpayers and the number of final PPh receipts before and after the application of PP No. 23 of this 2018.

**Keywords:** PP No. 23 of 2018, changes in tariffs, ease of paying taxes, dissemination of PP No. 23 of 2018, differences, UMKM taxpayers, final PPh receipts, MSME taxpayer compliance.

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, pada tahun 2017 pajak menyumbang APBN sebesar 85,64% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, pada tahun 2017 pajak menyumbang APBN sebesar 85,64% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber penerimaan yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak mempunyai peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009 dalam Handayani dan Noviani, 2016:1002).

Untuk itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dilakukan pemerintah, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal, seperti pada tanggal 1 Juli 2018 telah resmi diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) dibawah Rp. 4,8M ([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)). Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat berimplikasi terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan atau PPh. Tak hanya itu, penurunan tarif ini juga memberikan kemampuan lebih kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 hadir untuk menawarkan kemudahan bagi UMKM, kemudahan tersebut meliputi bentuk tarif pajak yang rendah, cara penghitungan, pelunasan, serta pelaporan pajak yang mudah dilakukan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## **2. METODE**

### **2.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa pembagian kuesioner, data sekunder didapat oleh peneliti melalui

teknik dokumentasi berupa jumlah wajib pajak UMKMdari penerimaan PPh final UMKM untuk masa pajak Juli 2017 – Desember 2017dan masa pajak Juli 2018 – Desember 2018, serta wawancara mengenai hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan PPh final.

## **2.2 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.

## **2.3 Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, yaitu KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo, KPP Pratama Boyolali, KPP Pratama Klaten, KPP Pratama Magelang, dan KPP Pratama Kebumen.

## **2.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya**

### **2.4.1 Variabel Dependen**

Yang dimaksud Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini adalah sejauh mana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.

### **2.4.2 Variabel Independen**

#### **2.4.2.1 Perubahan Tarif Pajak**

Dalam penelitian ini perubahan tarif pajak yang dimaksud merupakan suatu konsep penurunan tarif pajak dalam PP 46 Tahun 2013 yaitu 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto bersifat final.

#### **2.4.2.2 Kemudahan Membayar Pajak**

Dalam penelitian ini merupakan suatu perilaku seseorang untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar terbebas dari usaha keras dan juga dapat menghemat waktu serta biaya.

#### **2.4.2.3 Sosialisasi PP No.23 Tahun 2018**

Sosialisasi pajak yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh fiskus (baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak) terkait dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman dalam menghimpun masyarakat agar patuh dalam membayar pajak.

## **2.5 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (1)$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Perubahan Tarif Pajak

X<sub>2</sub> = Kemudahan Membayar Pajak

X<sub>3</sub> = Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018

e = Error

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Uji Hipotesis

Tabel. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T <sub>hitung</sub>	Sig
Konstanta	18,584	9,023	0,000
Perubahan Tarif	0,173	2,237	0,028
Kemudahan Membayar Pajak	0,018	0,153	0,878
Sosialisasi PP No. 23	0,284	3,883	0,000
R <sup>2</sup> = 0,606		F <sub>hitung</sub> =	51,750
Adjusted R <sup>2</sup> = 0,594		Sig =	0,000

Sumber: Hasil olah data, 2019

#### 3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 pada Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II ini menaikkan dan menurunkan Wajib Pajak UMKM maupun penerimaan PPh final. Di KPP Pratama Sukoharjo, KPP Pratama Klaten, KPP Pratama Magelang, dan KPP Pratama Kebumen masing-masing sebesar 26,4%, 26,72%, 12,58%, dan 28,54%, sedangkan pada KPP Pratama Surakarta dan KPP Pratama Boyolali mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,00% dan 2,88%. Untuk penerimaan PPh final, KPP Pratama Sukoharjo, KPP Pratama Boyolali, dan KPP Pratama Kebumen meningkat masing-masing sebesar 10,08%, 36,32%, dan 32,50%.



Sedangkan penerimaan PPh final pada KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Boyolali, dan KPP Pratama Magelang mengalami penurunan masing-masing sebesar 23,14%, 10,54%, dan 28,72%

- 3.2.2 Nilai  $t$  hitung untuk variabel tingkat perubahan tarif sebesar  $2,237 > 1,98350$  dan nilai signifikan sebesar  $0,028 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  gagal menolak hipotesis pertama yang artinya perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 3.2.3 Hasil  $t$  hitung untuk variabel kemudahan membayar pajak sebesar  $0,153 < 1,98350$  dan nilai signifikan sebesar  $0,878 > 5\%$ , sehingga  $H_4$  menolak hipotesis kedua yang artinya kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 3.2.4 Hasil  $t$  hitung untuk variabel sosialisasi PP No. 23 sebesar  $3,883 > 1,98350$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$ , sehingga  $H_3$  gagal menolak hipotesis ketiga yang artinya sosialisasi PP No. 23 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 3.2.5 Hasil uji beda dengan *wilcoxon signed rank test* untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sebesar  $0,028 < 0,05$ , Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo sebesar  $0,027 < 0,05$ , dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebumen sebesar  $0,046 < 0,05$ , sehingga terjadi perbedaan yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Adanya perbedaan ini dikarenakan tingkat kepatuhan yang meningkat akibat adanya penurunan tarif pajak yang semula 1% dari peredaran bruto menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Sedangkan, Hasil uji beda dengan *wilcoxon signed rank test* untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali sebesar  $0,463 < 0,05$ , Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten sebesar  $0,116 < 0,05$ , dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Magelang sebesar  $0,075 < 0,05$ , sehingga tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Tidak adanya perbedaan ini dikarenakan jumlah Wajib Pajak UMKM yang cenderung konstan dan tidak terjadi perubahan yang signifikan meskipun adanya perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%.

3.2.6 Hasil uji beda dengan *wilcoxon signed rank test* untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sebesar  $0,028 < 0,05$ , Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo sebesar  $0,046 < 0,05$ , Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali sebesar  $0,046 < 0,05$ , dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten sebesar  $0,028 < 0,05$ , sehingga terjadi perbedaan yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Adanya perbedaan ini dikarenakan penurunan tarif yang diberlakukan dalam regulasi ini yaitu yang semula 1% dari peredaran bruto menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Secara otomatis dengan adanya penurunan ini akan mengakibatkan jumlah penerimaan PPh final hanya berkurang setengah dari yang seharusnya diterima pada saat regulasi ini belum diberlakukan. Sedangkan, hasil uji beda dengan *wilcoxon signed rank test* untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang sebesar  $0,917 > 0,05$  dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen sebesar  $0,075 > 0,05$ , sehingga tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Tidak adanya perbedaan ini dikarenakan jumlah Wajib Pajak UMKM yang cenderung konstan dan tidak terjadi perubahan yang signifikan.

3.2.7 Hambatan yang ada yaitu kesadaran masyarakat yang belum tinggi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak terutama dalam pembuatan kode *billing*, Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui tentang tata cara penghitungan pajak terutama Wajib Pajak yang berada di wilayah pelosok dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada sehingga mereka belum memahami, dan juga karena bentuk WP itu bermacam-macam baik dari usia ataupun tingkat pendidikan Wajib Pajak yang berbeda-beda sehingga kita dituntut untuk bagaimana kita bisa menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan mereka memakai bahasa yang berbeda-beda pula. Dan upaya yang dilakukan seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak, bekerja sama dengan pihak luar seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, paguyuban UMKM, gerai BUMN terkait UMKM, serta pihak ketiga seperti perusahaan-perusahaan besar karena perusahaan-perusahaan besar ini mereka juga bertransaksi dengan UMKM, juga data dari dinas terkait dengan

data kendaraan, data kepemilikan rumah, transaksi tanah dan bangunan, dan lain sebagainya, serta transaksi bank meskipun transaksi ini belum bisa dilihat secara jelas. Upaya lain juga dilakukan oleh fiskus untuk mempermudah dan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak seperti adanya kantor pos mini dan ATM mini didalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, adanya loket pembayaran, loket untuk pembuatan kode *billing* berbentuk internet corner atau layanan mandiri, atau fiskus juga bisa membantu untuk pembuatan kode *billing* Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang tidak bisa menggunakan internet sehingga Wajib Pajak bisa langsung membayar. Dan untuk Wajib Pajak baru diberikan edukasi di loket edukasi yang bertempat di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) dan diberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 jika Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan yang melakukan usaha serta memiliki omset dibawah 4,8M.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

- 4.1.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diberlakukan di 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II mulai tanggal 1 Juli 2018 sejak diluncurkannya regulasi ini dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh fiskus seperti sosialisasi melalui radio, media sosial seperti instagram, facebook, ataupun twitter, media cetak seperti surat kabar, majalah, leaflet, spanduk dan banner, maupun juga dilakukan secara langsung melalui kampanye, penyuluhan, talkshow, workshop, expo UMKM, kegiatan sosialisasi seperti jalan sehat, pembagian leaflet, pembagian bunga, pembagian kipas yang berisi “tarif turun 0,5% bayar dengan senang hati” yang mana hampir 60%-70% Wajib Pajak hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Juga, fiskus melakukan sosialisasi ke tempat dimana Wajib Pajak berada.
- 4.1.2 Nilai t hitung untuk variabel perubahan tarif pajak sebesar  $2,237 > 1,98350$  dan nilai signifikan sebesar  $0,028 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  gagal menolak hipotesis

pertamayang artinya perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.1.3 Hasil  $t$  hitung untuk variabel kemudahan membayar pajak sebesar 0,153 < 1,98350 dan nilai signifikan sebesar 0,878 > 5%, sehingga  $H_4$  menolak hipotesis kedua yang artinya kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.1.4 Hasil  $t$  hitung untuk variabel sosialisasi PP No. 23 sebesar 3,883 > 1,98350 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 5%, sehingga  $H_3$  gagal menolak hipotesis ketiga yang artinya sosialisasi PP No. 23 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.1.5 Hasil perhitungan untuk nilai adjusted  $R^2$  dengan bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted*  $R^2$  sebesar 0,594. Hal ini berarti bahwa 59,40% variasi variabel kepatuhan Wajib Pajak UMUM dijelaskan oleh variabel perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No. 23. Sementara sisanya 40,60% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi penelitian ini.

4.1.6 Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pada KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo, dan KPP Pratama Kebumen mengalami perbedaan jumlah Wajib Pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan hasil uji beda *wilcoxon signed rank test* (nilai asymp sig < nilai  $\alpha$ ) masing-masing yaitu nilai asymp sig 0,028 < 0,05; 0,027 < 0,05; dan 0,046 < 0,05. Sedangkan, KPP Pratama Boyolali, KPP Pratama Klaten, dan KPP Pratama Magelang tidak mengalami perbedaan jumlah Wajib Pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan hasil uji beda *wilcoxon signed rank test* yaitu (nilai asymp sig > nilai  $\alpha$ ) masing-masing yaitu nilai asymp sig 0,463 > 0,05; 0,116 > 0,05; dan 0,075 > 0,05.

4.1.7 Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pada KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo, KPP Pratama Boyolali, dan KPP Pratama Klaten mengalami perbedaan jumlah penerimaan PPh final, hal ini dibuktikan dengan hasil uji beda *wilcoxon signed rank test* (nilai asymp sig < nilai  $\alpha$ ) masing-masing yaitu nilai asymp sig 0,028 < 0,05; 0,046 < 0,05; 0,046 < 0,05; dan 0,028 < 0,05. Sedangkan, KPP Pratama Magelang dan KPP Pratama Magelang tidak mengalami perbedaan jumlah Wajib Pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan hasil uji beda *wilcoxon*

*signed rank test* (nilai asymp sig > nilai  $\alpha$ ) masing masing yaitu nilai asymp sig  $0,917 > 0,05$  dan  $0,075 > 0,05$ .

- 4.1.8 Hambatan yang ada yaitu kesadaran masyarakat yang belum tinggi, Wajib Pajak kesulitan dalam pembuatan kode *billing*, Wajib Pajak pelosok yang tidak mengetahui tata cara penghitungan, dan juga karena bentuk WP bermacam-macam baik dari usia ataupun tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Upaya yang dilakukan seperti meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak, peningkatan pelayanan, dan kerja sama dengan pihak ketiga.

#### **4.2 Keterbatasan**

- 4.2.1 Meskipun penelitian ini diambil dari 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, namun dirasa bahwa kurang menyeluruh dikarena masih terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang belum bisa diteliti oleh peneliti secara menyeluruh.
- 4.2.2 Sampel yang diambil oleh peneliti dinilai terlalu sedikit, mengingat wilayah penelitian yang digunakan oleh peneliti cukup luas.

#### **4.3 Saran**

- 4.3.1 Peneliti selanjutnya dapat menggali variabel – variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel – variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 4.3.2 Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dimana hal ini akan menambah kualitas penelitian yang akan dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aalin', Elmi Rakhma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Kasus pada KPP Pratama Kota Kediri Tahun 2011-2016)". *Jurnal Riset Akutansi*. Vol. 3 No. 1 April 2018. Hal 1-9.
- Ariesta, Ristra Putri dan Lyna Latifah. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang". *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2017. Hal.173-187.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, Ni Putu Milan Novita dan Naniek Noviari. 2016. "Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan e-Billing dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 15 No. 2 Mei 2016. Hal.1001-1028.

Handoko, Iwan, Hasdi Aimon dan Efrizal Sofyan. 2013. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian dan Penerimaan Pajak di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. III No. 5 Juli 2015. Hal.1-13.

Herman. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai". *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*. Vol. 7 No. 1 April 2007. Hal.83-105.

Kastolani, dan Ardiyanto. 2017. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". *Diponegoro journal of accounting*. Vol. 6 No. 3 2017. Hal.1-10.

Keziana, Anwar Made, dan Doni Wirshandono Y. 2017. "Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. Hal.1-14.

Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro. 2018. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak". *Jurnal Riset dan Akuntansi Bisnis Airlangga*. Vol. 3 No. 1 Mei 2018. Hal.372-395.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Kementerian Keuangan. Jakarta.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Sekretariat Kementerian Keuangan. Jakarta.

- Muhammad, Arfaningsih dan Sunarto. 2018. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015". *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 2 No.1 April 2018. Hal.37-45.
- Nopiana, Puspita Rama dan Erni Yanti Natalia. 2018. "Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau". *Jurnal Benefita*. Vol. 3 No. 2 Juli 2018.Hal.277-290.
- Norsain, dan Abu Yasid. "Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM". *Jurnal PERFORMANCE*. Vol. IV No. 2 September 2014. Hal.1-13.
- Nuzula, Firdausi, Siti Ragil Handayani dan Devi Farah Azizah. 2015. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan*.Vol. 6 No. 2 2015.Hal.1-9.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehenif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahmawati, Dwi dan Bety Nur Achadiyah. 2016. "Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Pasuruan)". *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 3 No. 3 Januari 2016.Hal.207-214.
- Ramdhani, Neila. 2011. "Penyusunan Alat Pengukur Berbasis *Theory of Planned Behaviour*". *Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*. Vol. 19 No. 2 2011.Hal.55-69.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekreariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resyniar, Gandhys. 2013. "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013".
- Robbins, SP dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Buku 2. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Dian Lestari. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam". *Jurnal of Accounting & Management Innovation*. Vol. 1 No. 2 Juli 2017. Hal. 119-128
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempat belas. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, dan Ika Septiani Putri. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 No. 1 Juni 2017. Hal. 49-56.
- Tawas, Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, dan Robert Lambey. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 4 Desember 2016. Hal. 912-921.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening*". *Jurnal Nominal*. Vol. VII No. 1 2018. Hal. 33-54.



- Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogtakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, Dewi Muhharromah, Syska Lady Sulistyowatie, dan Imam Santosa. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua". *Kiat Bisnis*. Vol. 6 No. 5 Juni 2017. Hal.402-416.